

BAB II

DESKRIPSI UMUM OBYEK PENELITIAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

1. Letak Wilayah

Secara geografis Kota Yogyakarta terletak antara $110^{\circ} 24' 19''$ sampai $110^{\circ} 28' 53''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 15' 24''$ sampai $7^{\circ} 49' 26''$ Lintang Selatan Wilayah Kota Yogyakarta ini sudah terintegrasi dengan berbagai batasan, sehingga batas-batas administrasi sudah tidak terlalu mengikat. Oleh karena itu dibentuklah sekretariat bersama Kartamantul (Yogyakarta, Sleman, dan Bantul). Yang fungsinya adalah untuk mengurus kawasan aglomerasi Yogyakarta dan daerah-daerah perbatasan seperti (Depok, Mlati, Gamping, Kasihan, Sewon, Banguntapan). Kemudian Wilayah Kota Yogyakarta ini sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Sleman, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten bantul, sebelah barat berbatasan dengan kabupaten sleman, dan sebelah timur berbatasan dengan kabupaten sleman.

2. Luas Wilayah

Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah tersempit dibandingkan dengan wilayah atau daerah tingkat II lainnya, yaitu $32,5 \text{ Km}^2$ yang berarti hanya 1,025% dari luas wilayah Provinsi DIY. Dengan luas hanya 3.250 hektar itu terbagi menjadi 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 617 RW, 2.531 RT, dan dengan jumlah penduduk 428.282 Jiwa (sumber data dari SIAK

per tanggal 28 Februari 2013) dengan kepadatan penduduk rata-rata 13.177 jiwa/Km².

3. Keadaan Alam

Secara garis besar Kota Yogyakarta merupakan dataran rendah dimana dari barat ke timur relatif datar dan dari utara ke selatan memiliki kemiringan ± 1 derajat, kemudian Kota Yogyakarta terdapat aliran sungai yang melintas sebanyak 3 (tiga) sungai, yaitu sebelah timur adalah Sungai Gajah Wong, bagian tengah adalah Sungai Code, sebelah barat adalah Sungai Winongo.

4. Tipe Tanah

Kondisi tanah di Kota Yogyakarta ini cukup subur dan memungkinkan untuk ditanami berbagai jenis tanaman pertanian maupun perdagangan, karena letaknya yang berada pada lereng Gunung Merapi (fluvia vulcanic foot plain) yang pada intinya megandung tanah regosol atau tanah vulkanis muda. Berjalannya waktu dengan berbagai perkembangan dan pemukiman yang sangat cepat, lahan pertanian di Kota Yogyakarta setiap tahunnya mengalami penyusutan. Dari data tahun 1999 bahwa mengalami penyusutan sebanyak 7,8% dari luas area Kota Yogyakarta (3.249,75) dikarenakan telah beralih fungsi lahan.

5. Iklim

Tipe iklim di Kota Yogyakarta ini ada “AM” dan “AW”, curah hujannya rata-rata 2.102 mm/thn dengan 119 hari hujan, dengan suhu rata-rata 27,2° C dan kelembaban udara rata-rata 24,7%. Jenis angin umumnya bertiup angin muson dan pada musim hujan bertiup angin barat daya dengan arah 220° yang bersifat basah dan mendatangkan hujan. Pada musim kemarau angin bertiup angin muson tenggara yang sedikit kering dengan arah ± 90° - 140° dan rata-rata kecepatannya 5-16 kno/jam.

B. Sejarah Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta berawal ketika adanya kejadian perjanjian ganti pada tanggal 13 Februari 1755 dan ditanda tangani oleh kompeni belanda dibawah Gubernur Nicholas Hartingh diatas nama Gubernur Jendral Jacob Mossel. Isi dari perjanjian itu adalah Negara Mataram terbagi menjadi dua, yaitu setengah menjadi Hak Kerajaan Surakarta dan setengahnya lagi dimiliki oleh Pangeran Mangkubumi. Isi dari perjanjian ini menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi diakui menjadi raja setengah daerah Kerajaan Jawa dengan Gelar Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Alega Abdul Rachman Sayidin Panatagama Khalifatullah.

Daerah-daerah yang menjadi kekuasannya itu adalah Mataram (Yogyakarta), seperti Sukowati, Kedu, Bagelen, Bumigede, Pojong dan ditambah daerah-daerah dari mancanegara, yakni Cirebon, Separuh Pacitan, Tulungagung, Bojonegoro, Sela, Grobogan, Wonosari, Kuwu, Kalangbret, Kartosuro, Madiun, Magetan.

Kemudian setelah adanya perjanjian Gianti tersebut atau pembagian daerah, Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I menetapkan pada tanggal 13 Maret 1755 bahwa Daerah Mataram tersebut diberi nama Ngayogyakarta Hadiningrat yang beribukota di Ngayogyakarta (Yogyakarta).

Pada waktu itu Ibukota yang jadi pusat pemerintahan adalah daerah hutan dimana disitu disebut sebagai hutan beringin, didalamnya terdapat desa kecil yakni desa Pachetokan, kemudian terdapat tempat Pesanggrahan yang dinamai Garjitowati dan dibuat oleh Susuhunan Paku Buwono I dan diubah kembali menjadi ayodya. Setelah penetapan itu diumumkan kemudian Sultan Hamengku Buwono memerintakan ke masyarakat agar membabad hutan tersebut untuk didirikan sebuah kraton.

Sebelum Kraton itu jadi Sultan Hamengku Buwono sudah menempati Pesanggrahan Ambarketawang yang berada di Daerah Gamping dalam masa pembangunan dan pada tanggal 9 Oktober 1755 Pesanggrahan itu diresmikan. Ditempat inilah Sultan Mengawasi dan mengatur proses pengerjaan Kraton.

Setelah 1 Tahun masa pembangunan Sultan meninggalkan Pesanggrahan Ambarketawang dan pada tanggal 7 Oktober 1756 Sultan Hamengku Buwono I meresmikannya dan sudah menempatinya. Dengan demikian berdirilah Kota Yogyakarta (Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat).

Kota Yogyakarta berdiri pada tahun 1755 kemudian dalam waktu yang sama dalam pembangunan Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I di Hutan Beringin, ada suatu kawasan dimana terdapat Sungai Winongo dan Sungai Code yang sangat strategi menurut segi pertahanan keamanan pada waktu itu.

Telah bertahun-tahun Kota Yogyakarta berdiri dan sampailah pada kemerdekaan Indonesia. Sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII diangkat menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DIY dan mendapatkan piagam yang dilantik oleh Presiden RI pada waktu itu. Kemudian pada tanggal 5 September 1945 beliau mengeluarkan amanat yang berisi bahwa Daerah Kesultanan dan daerah Pakualaman merupakan Daerah Istimewa dan menjadi bagian dari Republik Indonesia tertuang dalam pasal 18 UUD 1945. Selanjutnya, pada tanggal 30 Oktober 1945 mereka membuat kebijakan kembali bahwa pelaksanaan pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta akan dilaksanakan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII bersama dengan Badan Pekerja Komite Nasional.

Meskipun Kota Yogyakarta telah berdiri dan menjadi bagian Kesultanan dan Pakualaman yang dapat membentuk DPR Kota dan Dewan Pemerintahan Kota dipimpin oleh kedua Bupati Kota Kesultanan dan Pakualaman, akan tetapi Kota Yogyakarta belum menjadi Kota

Otonom, karena dalam pelaksanaan pemerintahannya kekuasaan otonomi masih dipimpin oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kota Yogyakarta yang meliputi seperti daerah Kesultanan dan daerah Pakualaman baru menggunakan sistem otonomi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947. Dalam pasal I, menjelaskan bahwa Kabupaten Kota Yogyakarta yang meliputi daerah wilayah Kasultanan dan Pakualaman serta daerah lainnya dari Kabupaten Bantul yang berubah menjadi Kotagede dan Umbulharjo yang ditetapkan sebagai daerah yang bisa mengatur daerahnya sendiri. Daerah ini yang dinamakan Haminte Kota Yogyakarta.

Walikota Kota Yogyakarta yang pertama yakni Ir. Moh Enoh mengalami kesulitan dalam melaksanakan otonomi daerah tersebut. Karena wilayahnya masih merupakan Daerah Istimewa Yogyakarta dan statusnya pun belum dilepas. Hal ini sudah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah, dimana disini dijelaskan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai tingkat I dan Kotapraja Yogyakarta sebagai tingkat II yang menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Walikota Yogyakarta kedua yang dijabat oleh Mr. Soedarisman Poerwokusumo memegang dua kekuasaan, yaitu sebagai Badan Pemerintah Harian dan menjadi Pimpinan Legislatif dulu yang bernama DPR-GR yang dan beranggotakan 25 orang. DPRD Kota Yogyakarta dibentuk pada tanggal 15 Mei 1958 dengan anggota 20 orang yang berasal dari Pemilu

1955. Dengan melihat UUD 1945 melalui Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 diganti dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah, yakni tugas Kepala Daerah dan DPRD harus dipisahkan dan dibentuk Wakil Kepala Daerah dan Badan Pemerintah Harian serta Kotapraja diganti dengan Kotamadya Yogyakarta.

Dasar dari Tap MPRS Nomor XXI/MPRS/1966 yang dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Dilihat dari Undang-undang tersebut bahwa, DIY merupakan Provinsi dan menjadi daerah tingkat I yang dipimpin oleh Kepala Daerah (Gubernur) dan Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur) Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak terikat adanya ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, terkhusus bagi Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII. Kemudian Kotamadya Yogyakarta sebagai daerah Tingkat II yang dipimpin oleh Walikotamadya yang terikat oleh ketentuan masa jabatan, cara pengangkatan bagi Kepala Daerah Tingkat II seperti yang ada di daerah lainnya.

Dengan berjalannya masa reformasi, penyelenggaraan pemerintahan di daerah secara otonom semakin mengemuka, dengan munculnya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan daerah untuk mengatur daerahnya sendiri secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan sesuai UU ini

sebutan dari Kotamadya Dati II Yogyakarta dirubah menjadi Kota Yogyakarta sedangkan untuk pemerintahannya disebut dengan Pemerintahan Kota Yogyakarta yang dipimpin oleh Walikota Yogyakarta sebagai Kepala Daerahnya.

C. Lambang Daerah

Dalam suatu daerah pasti memiliki makna (Lambang) daerah, namun lambang itu memiliki makna seperti contohnya Kota Yogyakarta. Dibawah ini akan dipaparkan mengenai makna dari lambang Kota Yogyakarta itu sendiri.

1. Makna Lambang

Gambar 2.1 Lambang Daerah Kota Yogyakarta



Sumber wikipedia.com

Dasar hukum dari Lambang Kota Praja Yogyakarta ini melalui ketetapan DPRD Nomor 2 Tahun 1952 tentang Penetapan Lambang Kota

Praja Yogyakarta. Dibawah ini akan menjelaskan makna lambang Kota Praja Yogyakarta.

1. Perbandingan Ukuran 18 : 25, yakni untuk memperingati permulaan dari perjuangan Pangeran Diponegoro di Yogyakarta (tahun 1825)
2. Simbol Warna
 - a) Warna Hitam : Simbol Keabadian;
 - b) Warna Kuning dan Keemasan : Simbol Keluhuran;
 - c) Warna Putih : Simbol Kesucian;
 - d) Warna Merah : Simbol Keberanian;
 - e) Warna Hijau : Simbol Kemakmuran
3. Mangayu Hayuning Bawono, yakni cita-cita untuk menyempurnakan masyarakat
4. Bintang Emas, yakni cita-cita kesejahteraan yang dapat dicapai dengan usaha kemakmuran
5. Padi dan Kapas, yakni Jalan yang ditempuh dalam usaha sandang dan pangan
6. Perisai, yakni Lambang Pertahanan
7. Tugu, yakni Ciri khas Kota Yogyakarta
8. Dua Sayap, yakni Lambang kekuatan yang harus seimbang
9. Gunung, yakni Lambang kebudayaan
 - a) Beringin Kurung, yakni Lambang Kerakyatan
 - b) Benteng, yakni Lambang semangat keberanian
 - c) Keris, yakni Lambang perjuangan

10. Terdapat dua sengkala

- a) Gunaning Keris Anggatra Kota Praja, yakni tahun 1953 merupakan permulaan pemakaian Lambang Kota Yogyakarta
- b) Warna Hasta Samadyaning Kotapraja, yakni tahun 1884

2. Flora dan Fauna Identitas Kota Yogyakarta

Identitas ini dalam rangka menumbuhkan menjadi kebanggaan dan maskot daerah yang telah ditetapkan pohon Kelapa Gading (*Cocos Nucifera* var. *Gading*) dan Burung Tekukur (*Streptopelia Chinensis Tigrina*) sebagai flora dan fauna identitas Kota Yogyakarta.

Makna dari Pohon Kelapa Gading ini tak lepas dari pola kehidupan masyarakat Yogyakarta dimana Kelapa Gading merupakan tanaman raja yang mempunyai nilai filosofis tersendiri dan nilai budaya yang sangat tinggi, selain itu sebagai kelengkapan dalam upacara tradisional/religius, mempunyai makna simbolis dan berguna juga sebagai obat tradisional

Kemudian makna Burung Tekukur dengan suara yang merdu serta bentuk sosok tubuh yang indah mampu memberikan suasana kedamaian bagi yang mendengarnya dan menjadi kesayangan para pangeran yang ada dilingkungan Kraton. Dengan mendengar suara burung tekukur diharapkan orang akan terikat pada Kota Yogyakarta.

D. Visi dan Misi

Visi dan misi merupakan arah gerak ataupun arah tujuan yang harus ada pada setiap daerah. Daerah harus mempunyai visi dan misi agar dalam pelaksanaan mensejahterakan masyarakat harus punya arah dan tujuan.

1. Visi

Visi Kota Yogyakarta adalah Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan.

2. Misi

- a) Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat
- b) Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta
- c) Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta
- d) Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya
- e) Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan
- f) Membangun sarana prasarana publik dan pemukiman
- g) Meningkatkan tatakelola pemerintah yang baik dan bersih

E. Perkembangan Rencana Tata Ruang Kota Yogyakarta

Perkembangan rencana tata ruang wilayah di Kota Yogyakarta ini sudah melewati berbagai masalah maupun dampaknya. Rencana tata ruang di kota Yogyakarta dihadapkan dengan permasalahan yang muncul

tentunya banyak juga yang harus diatur agar dalam pelaksanaannya tata ruang kota yogyakarta dapat menjadi lebih baik lagi.

Pembentukan Kota yogyakarta ini memulainya dari keberadaan Kraton yang dipakai untuk pusat pemerintahan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sejak tanggal 7 Oktober 1756. Pada saat itu, pusat kota dibangun oleh Pangeran Mangkubumi, tidak hanya dengan kemampuan teknis teknologi, namun berlandaskan sikap batin dan sikap jiwa dalam kaitannya hubungan antara makhluk dengan penciptanya. Pusat kota yang mengambil area bekas dari hutan beringin dan berada pada dua sungai yang memperhitungkan aspek rasional maupun irrasional. Faktor pengamanan, kesejahteraan manusia, ketenaangan batin dan memenuhi filosofi pandangan hidup pada masyarakat jawa, yang merupakan hasil dari olah pikir didasari bagaimana pusat kota ini diciptakan. Pada intinya bahwa komponen-komponen tata ruang kota adalah “poros imajiner” secara filosofis mempunyai makna bahwa hubungan mikrokosmos-mikrokosmos yang mewujudkan pada garis as sejalur jalann panggung Krapyak – Kraton – Tugu Palputih yang dihubungkan dengan garis irrasional Laut Selatan – Kraton – Gunung Merapi. Garis itulah yang membentuk atau yang menjadi dasar kerangka utama tata ruang pusat kota, membentuk jalur yang dewasa ini dikenal dengan ‘jalur H’, yang berpusat dari posisi Kraton. Garis as inilah yang menjadi dasar dari “poros kota” yang kemudian menjadi pusat pertemuan jejaring jalur jalan yang memancar dari pusat kota ke daerah-daerah wilayah pinggiran kota dan

sekitarnya yang membentuk satu kesatuan struktur tata ruang kota, sesuai dengan perkembangannya.

Filosofi kota Yogyakarta ini tidak lepas dari keberadaan kraton yang menampilkan dirinya sebagai kota yang secara spesifik sebagai citra kota Yogyakarta. Filosofi itu juga menjadi dasar atau pondasi yang kuat dan berlandaskan sistem religi, sistem kebudayaan, dan sistem sosial. Arti kraton dan tata fisik jabarannya dalam struktur tata ruang kota ini merupakan transformasi konsep dasar dari sistem religi. Manunggaling lan gusti dan sangkan paraning dumadi menjadi latar belakang olah religi dan olah budaya kota, yang dapat berjalan waktu ke waktu dan menjadi inspirasi/konsep pemikiran dan penataan kota Yogyakarta yang berintikan pada kota lama, lingkungan kraton dan sekitarnya. Susunan wilayah kota Yogyakarta didasari pada aspek kebudayaan yang berada diatas dari keseluruhan yang membentuk eilayah tatatanan kemasyarakata dalam wilayah tata ruang fisik kota dan terus berkembang menjadi kota seperti sekarang.

Dalam tatanan kota Yogyakarta terdapat filosofi catur gatra tunggal, yaitu adanya beberapa unsur seperti kraton, masjid, pasar, alun-alun yang membentuk tata ruang pusat kota. kemudian ke arah keluar dan berlapis-lapis untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat dari pusat kerajaan, melambangkan “dharmaning ratu”. Beberapa waktu kemudian dan secara alami berkembang fungsi-fungsi dari pelayanan di sekitar poros utama kota antara alun-alun utara dan tugu palputih di bagian utara kota.

fungsi-fungsi tersebut merupakan landasan dari terwujudnya “dharmaning ratu”, kraton sebagai awal dari kegiatannya sebagai pusat kebudayaan, kemudian berkembang dengan berbagai pola dan bentuk perkembangannya. Perkembangan fungsi-fungsi tersebut baik pelayanan kehidupan kota dari waktu ke waktu terjadi dominasi fungsi pada kehidupan kota saat ini.

Kemudian adanya predikat kota yang secara alami dibentuk dari perilaku masyarakat kehidupan kota itu sendiri, seperti contohnya dicerminkan dalam tata guna lahan. Predikat kota yang terbentuk dari fungsi-fungsi dominan tadi dapat diurutkan sebagai berikut.

- a. Kota budaya
- b. Kota perjuangan
- c. Kota pendidikan, dan
- d. Kota pariwisata

Namun berdasarkan perkembangan sejarah kehidupan dan fungsi kota sebagai predikat kota ada beberapa kriteria dalam pembentukan predikat kota, sebagai berikut.

- a. Realita dominasi fungsi tatanan kehidupan kotaa
- b. Didukung oleh tatanan kehidupan masyarakat kota
- c. Dicterminkan oleh tata pemanfaatan lahan dan bangunan
- d. Diciptakan kehidupan yang riil secara fisik maupun non fisik pada tatanan ruang kota.

Pada proses perkembangan tata ruang kota awalnya berbentuk pada

pusat kraton dengan poros utama antara Alun-alun Utara sampai dengan Tugu Pal putih, kemudian dilengkapi dengan komunitas-komunitas secara berlapis-lapis yang berada pada pinggiran kota dan membentuk inti kota lama. Namun, dalam perkembangannya saat ini bahwa dengan tumbuhnya pusat pendidikan, pusat perdagangan jasa, pusat transportasi, pusat rekreasi, pusat produksi jasa, pusat-pusat permukiman kearah perkembangan baru, membentuk tatanan ruang kota dengan berbagai – pusat kegiatan.

Jejaring jalan yang berkembang dan memancar ke arah luar dari jalur H yang ada dipusat, dengan jalur kisi-kisi terbentang ke arah utara-selatan dan ke arah barat-timur saling bersilangan melintasi jalur sugai yang ada, membentuk jalur satu kesatuan struktur tata ruang kota. Jejaring struktur tata ruang kota kedepan harus ada dalam sistemn hirarki pelayanan jalan yang pas, dalam rangka menciptakan jari diri tata ruang kota. Jati diri tata ruang kota ini memang sudah dibentuk sebagai peradahan jati diri olah pikir, olah budaya dan sistem kehidupan kota yang berkembang.

Untuk mengupayakan pemanfaatan ruang yang lebih lanjut daru dasar pembentukan kota dan unsur-unsur yang mendasarinya adalah komitmen masyarakat dan pengelola kota untuk tetap membina dan membangun kota dengan latar belakang sejarah dan budaya kota. Hal ini dapat diakumulasikan dalam upaya pelestarian agar tetap mempunyai jati diri kota.